



KONFLIK PAPUA DAN MASALAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MOHAMMAD TEJA^{*)}

Abstrak

Konflik Papua bukanlah konflik tunggal, namun mengandung berbagai aspek yang menjadi pemicunya. Masalah kesejahteraan masyarakat adalah salah satu pemicu konflik tersebut. Oleh karena itu, selayaknya Pemerintah dapat memandang permasalahan secara komprehensif dan mengatasi konflik yang ada secara cermat. Penanganan konflik dengan mengedepankan pendekatan keamanan sebaiknya ditinjau kembali, dan perlu pendekatan yang relevan dengan mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat.

Konflik sangat erat hubungannya dengan kepentingan antarkelompok yang mendasari nilai-nilai kekuasaan. Perbedaan nilai dan identitas juga memberikan pengaruh yang sangat besar, selain ketimpangan ekonomi, kepentingan, dan kontrol terhadap kekuasaan. Konflik bukan mustahil berawal dari ketidakadilan ekonomi, kemudian menyebar menjadi konflik identitas kesukuan yang memberikan kekuatan lebih untuk menumpuk kebencian dan memberikan dampak panjang terselesaikannya konflik tersebut.

Banyaknya suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan aset yang berharga, namun juga sekaligus membuat Indonesia rentan terhadap berbagai konflik. Pembangunan yang tidak merata, merupakan salah satu persoalan yang menjadi titik tolak dan akar dari munculnya berbagai konflik. Persoalan kemiskinan, kesenjangan

budaya, ketimpangan pembangunan antara satu daerah dengan yang lain, korupsi, dan sebagainya adalah persoalan krusial yang tidak mudah diselesaikan tanpa *good will* pemerintah. Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen yang kuat dan tindakan yang tegas dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Papua memiliki geografi yang unik, dimana penduduk berada di kawasan yang tidak mudah dijangkau. Kebudayaan yang begitu kuat di antara suku-suku lainnya sangat membutuhkan perlakuan khusus dalam mendorong kemajuan daerah tersebut. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Papua. Seorang penyanyi asal Papua, Edo Kondologit mengatakan bahwa masalah Papua selama ini adalah pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Orang Papua ingin kesejahteraan, ingin hidup layak, bukan yang muluk-muluk. Mereka ingin makan, anak-anak sekolah dengan baik,

^{*)} Calon Peneliti bidang Sosiologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: mohammadteja_76@yahoo.co.id

punya rumah yang layak, kesehatan yang baik, dan puskesmas yang baik.

Konflik dan Otonomi Khusus

Sebuah LSM menyatakan bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan persoalan konflik Papua dan pemerintah tidak pernah serius dalam penanganan kericuhan yang akhir-akhir ini sering terjadi di bumi Cendrawasih tersebut. Yang diperlukan masyarakat Papua adalah merebut ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi, sehingga bila pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dikuasai rakyat Papua, maka Sumber Daya Alam (SDA) tentu dapat dikelola oleh rakyat Papua sendiri dengan pedoman pada otonomi daerah, sehingga tidak tergantung pada tenaga asing. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mencari penyelesaian dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah seharusnya tidak lagi mengedepankan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik Papua. Konflik berkepanjangan dan pendekatan keamanan hanya akan membuat subur kebencian terhadap pemerintah.

Salah satu akar masalah konflik Papua adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata, di mana kekayaan alam Papua terus dikeruk namun sama sekali tidak berimbas pada kehidupan masyarakatnya. “Dana otonomi khusus yang cukup besar” dalam mekanismenya selalu berhenti pada birokrasi, baik di tingkat II maupun di tingkat pusat. Dengan demikian, dana otonomi khusus yang besarnya hingga triliunan rupiah tidak sampai kepada masyarakat.

Perlu dilakukan dialog intensif antara pemerintah dengan Majelis Rakyat Papua serta tokoh-tokoh adat yang merasa dikecewakan (karena melimpahnya dana otonomi khusus tidak pernah sampai ke rakyat Papua). Selain itu perusahaan besar yang mendunia mengeruk habis-habisan sumber alam, tetapi bagi rakyat Papua sendiri tidak pernah ada benefit yang signifikan. Dalam rangka mengupayakan kesejahteraan masyarakat Papua, saat ini

sangat diperlukan renegosiasi kontrak karya dengan PT *Freeport* agar bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Papua mendapatkan bagian yang adil. Negara tak boleh lagi membiarkan ketidakadilan di tanah Papua. Yang terjadi selama ini, setelah emas, tembaga, perak dan mineral berharga lainnya dikeruk, pajak yang dikenakan kepada PT. *Freeport* hanya 1 (satu) persen, dan galian tambang tersebut dianggap galian C yang setara dengan batu dan pasir. Ini benar-benar ketidakadilan yang luar biasa.

Otonomi Khusus: Apa yang Diterima Masyarakat Papua?

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin oleh Presiden harus menyusun agenda konkrit untuk kesejahteraan Papua dan melakukan dialog yang efektif dengan segala komponen besar masyarakat Papua. Evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus tak bisa dielakkan lagi untuk dikaji ulang. Menurut hasil pemeriksaan BPK, ada penyelewengan dana otonomi khusus sebesar Rp.4,2 triliun dari total dana otonomi khusus sebesar Rp.28,8 triliun pada 2002-2010.

Dalam prakteknya, selama ini otonomi khusus tidak dijalankan sepenuh hati, konsep otonomi khusus tidak jelas dan tidak ada badan yang berwenang untuk mengawal percepatan pembangunan, tidak yang memperlancar komunikasi dan juga memastikan dana yang dialirkan dari pemerintah pusat dan pendapatan daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Sejak Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kewenangan pemerintah daerah sangat luas, mulai dari kewenangan politik luar negeri, pertahanan, moneter, fiskal, agama, hingga peradilan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri.

Setelah otonomi khusus diberlakukan di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua

Barat, jumlah dana yang dikucurkan cukup besar yaitu sekitar Rp.30 triliun, namun tidak menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan pada masyarakat Papua. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut mengharuskan adanya evaluasi setiap tahun dan pertama kali dilakukan pada akhir tahun ketiga setelah pemberlakuan undang-undang. Pentingnya peningkatan sumber daya manusia Papua khususnya mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting sebagai penentu kebijakan merupakan tugas utama yang menjadi prioritas, karena hal ini akan menjadi jalan bagi implementasi yang benar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Inpres Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat yang dikeluarkan pada tahun 2007, yang kini diperbarui melalui Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagai pelaksanaannya dibuat Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Kedua Perpres ini dikeluarkan pada 20 September 2011, tetapi diumumkan pada saat Papua bergejolak. Perpres itu dilengkapi dokumen rinci mengenai Rencana Aksi yang Bersifat Cepat Terwujud Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2001-2012. Inpres tersebut perlu ditindaklanjuti, dan tentu saja setelah konflik Papua diselesaikan, karena tidak mungkin melakukan pembangunan manakala Papua dalam situasi konflik.

Diperlukan komitmen tata pengelolaan otonomi khusus dari pemerintah melalui evaluasi yang melibatkan semua unsur masyarakat Papua termasuk di dalamnya masyarakat yang menolak otonomi khusus, pemerintah pusat, dan daerah, agar semua masukan untuk perbaikan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat dapat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 21 Tahun 2011, dan diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan otsus. Dalam hal ini indikator kesejahteraan masyarakat Papua adalah

seberapa serius pemerintah pusat akan mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Menurut Bagong Suyanto, persoalan lain yang mengemuka adalah kompensasi kepada penduduk lokal dari pihak industri selain menyebabkan memudarnya kohesi sosial antar suku satu dan suku lainnya, dalam batas-batas tertentu juga memunculkan terjadinya proses soliterisasi. Proses ini berupa memudarnya rasa solidaritas antarsuku atau antaretnis, makin menguatnya batas-batas deferensiasi sosial antarsuku yang berbeda, dan bahkan ditandai pula dengan lahirnya kecemburuan sosial. Pola-pola stratifikasi sosial baru yang ditandai dengan mengedepannya basis material, bukan pada tradisi dan hal-hal yang bersifat berasal dari mereka. Polarisasi yang terbentuk dalam masyarakat adalah akibat tekanan dan tuntutan pembangunan dan perubahan baru yang terlalu mementingkan kepentingan politik dan ekonomi.

Rusaknya alam Papua akibat eksploitasi dan tidak sejahteranya masyarakat suku-suku di pedalaman menambah sulitnya penanganan masalah sosial di Papua. Peranan tradisi dan adat istiadat hanya menjadi instrumen dan seringkali dalam beberapa kasus hanya dijadikan alat legitimasi untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Ironisnya, adat-istiadat dan tradisi tersebut tidak memiliki kekuatan pengikat yang sama jika berkaitan dengan pihak-pihak tertentu. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin masyarakat Papua akan meninggalkan tradisi dan adat-istiadat yang khusus dimiliki dalam tiap suku yang ada di sana.

Simpulan

DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar memandang konflik Papua secara komprehensif dan mencari akar masalah yang menjadi pemicu konflik selama ini. Dengan memahami permasalahan

secara komprehensif, maka Pemerintah perlu mengatasi konflik yang ada dengan menggunakan pendekatan yang relevan, dan bukan dengan mengedepankan pendekatan keamanan saja. Salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan adalah masalah kesejahteraan masyarakat Papua, di mana selama ini telah terjadi ketidakadilan akibat berbagai penyelewengan dan kontrak karya perusahaan yang timpang.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat Papua, diperlukan intensifikasi lembaga pengawas dan evaluasi dari pusat untuk mengawasi pemerintah daerah dalam mengelola aliran dana dan implementasi program dalam rangka kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, diperlukan informasi yang transparan terhadap kemajuan dan kemunduran bahkan penyelewengan yang dilakukan di Papua. Juga diperlukan analisis terhadap program-program yang telah berjalan, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua.

Rujukan:

1. Ho-Won Jeong, 2008, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, London: SAGE Publicatins Ltd.
2. “Kesejahteraan Akar Masalah di Papua”, <http://news.okezone.com/read/2011/11/01/337/523408/kesejahteraan-akar-masalah-di-papua>, diakses tanggal 2 November 2011.
3. “Pendekatan Kesejahteraan Untuk Papua”, <http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/4057-velix-pendekatan-kesejahteraan-untuk-papua>, diakses tanggal 2 November 2011.
4. Lihat Fajar Nuryanto, “Peningkatan Kesejahteraan Solusi Terbaik Untuk Papua”, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/08/02/35068/Peningkatan-Kesejahteraan-Solusi-Terbaik-Untuk-Papua->, diakses tanggal 2 November 2011.
5. “Gejolak Papua Berakar dari Ketimpangan Kesejahteraan”, <http://news.okezone.com/read/2011/10/26/337/520644/gejolak-papua-berakar-dari-ketimpangan-kesejahteraan>, diakses tanggal 2 November 2011.
6. “Perkuat Kemampuan Pemerintah Daerah”, *Kompas*, 3 November 2011.
7. “Otonomi Khusus Tak Jawab Persoalan”, *Kompas*, 4 November 2011.
8. “Pembangunan Papua Buat Siapa?”, *Kompas*, 2 November 2011.
9. Libatkan Masyarakat, “Implementasi dan Pencapaian Otonomi Khusus Papua Tak Jelas”, *Kompas*, 7 November 2011.
10. “Jati Diri Papua”, *Kompas*, 3 November 2011,.